



IMPLIKASI HUKUM PENYEDERHANAAN BIROKRASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI



Komisi Pembimbing:
Dr. Yuslim, S.H.,M.H.
Dr. Khairani, S.H.,M.H.

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025

ABSTRAK

“IMPLIKASI HUKUM PENYEDERHANAAN BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI”

(Serieli Bawamenewi, NIM 2120113008, Program Studi Magister Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2025)

Birokrasi selama ini identik dengan citra buruknya dalam hal kualitas pelayanan, lambatnya prosedur, inefisiensi, kegagalan pelaksanaan program, kualitas sumber daya manusia, sistem dan tata kerja yang masih kaku dan berbelit-belit ditujukan pada buruknya kinerja Pegawai Negeri Sipil. Masalah birokrasi ini adalah sangat kontras dengan apa yang seharusnya dilakukan dan dicapai oleh birokrasi publik. Menyikapi hal tersebut pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satu di antaranya adalah upaya penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi yang memangkas tingkat unit kerja instansi pemerintah sampai dengan dua tingkatan, penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, dan penyesuaian sistem kerja instansi pemerintah. Penelitian ini mengkaji bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mengimplementasikan penyederhanaan birokrasi serta bagaimana dampak hukum penyederhanaan birokrasi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai? Jenis/tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan berupa teknik studi dokumen untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mengimplementasikan penyederhanaan birokrasi adalah melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Penyederhanaan struktur organisasi yang dilakukan adalah pemangkasan level unit organisasi perangkat daerah menjadi dua tingkatan, yakni level unit kerja eselon II dan level unit kerja eselon III. Sementara pemangkasan unit kerja dilakukan terhadap pengurangan jumlah unit kerja eselon IV dan eselon V. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyederhanaan struktur organisasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya memenuhi kriteria unit kerja jabatan administrasi yang disederhanakan maupun dipertahankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Hal ini telah menyebabkan masih belu semua Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki struktur organisasi sesuai dengan yang diharapkan, yakni sampai dua tingkatan. Hal ini tentu akan berimplikasi pada penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja yang belum maksimal.

Kata Kunci: Implikasi, Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintahan Daerah, Penyetaraan Jabatan, Pelayanan Publik.

ABSTRACT

“LEGAL IMPLICATIONS OF BUREAUCRACY SIMPLIFICATION IN GOVERNMENT IMPLEMENTATION IN MENTAWAI ISLANDS REGENCY”

*(Serieli Bawamenewi, NIM 2120113008, Master of Law Study Program, Faculty
of Law, Andalas University, 2025)*

Bureaucracy has so far been synonymous with its bad image in terms of service quality, slow procedures, inefficiency, failure to implement programs, quality of human resources, systems and work procedures that are still rigid and complicated, all of which are aimed at the poor performance of Civil Servants. This bureaucratic problem is in stark contrast to what public bureaucracy should do and achieve. In response to this, the government has made various efforts, one of which is an effort to simplify the bureaucracy through simplifying the organizational structure by cutting the level of government agency work units to two levels, equalizing administrative positions into functional positions, and adjusting the work system of government agencies. This study examines the efforts made by the Mentawai Islands Regency Government in implementing bureaucratic simplification and the impact of the bureaucratic simplification law on the implementation of government in the Mentawai Islands Regency? The research results obtained are that the efforts made by the Mentawai Islands Regency Government in implementing bureaucratic simplification are through simplifying the organizational structure, equalizing positions and adjusting the work system. The simplification of the organizational structure carried out was the reduction of the regional apparatus organizational unit level into two levels, namely the echelon II work unit level and the echelon III work unit level. Meanwhile, the work unit cuts were carried out on the reduction of the number of echelon IV and echelon V work units. The results of the study indicate that the simplification of the organizational structure in the Mentawai Islands Regency has not fully met the criteria for simplified or maintained administrative position work units as regulated in the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 25 of 2017 concerning the Simplification of the Organizational Structure of Government Agencies for Bureaucratic Simplification. This has caused not all Regional Devices in the Mentawai Islands Regency to have an organizational structure as expected, namely up to two levels. This will certainly have implications for equalizing positions and adjusting work systems that are not yet optimal.

*Keywords: Implications, Bureaucratic Simplification, Regional Government,
Position Equivalence, Public Services.*